



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 11(2), 137-146

RESEARCH ARTICLE

KROMO TANI MELAWAN: HAJI MISBACH DAN AKSI PROTES KAUM TANI SURAKARTA

Muhammad Bagus Saefiyansyah Putra, Suwirta

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
bagusstuka@gmail.com

Naskah diterima : 5 Oktober 2018, Naskah direvisi : 20 Juni 2022 Naskah disetujui : 30 September 2022

To cite this article: Putra, M. B. S., & Suwirta. (2022). Kromo tani Melawan: Haji misbach dan aksi protes kaum tani surakarta tahun 1919. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 11(2), 137-146. <https://doi.org/10.17509/factum.v11i2.13456>.

Abstract

This writing examines the role of Haji Misbach and its relation to the peasants' protest of Surakarta in 1919. Between 1918-1919 Haji Misbach was an active member of NIP (Nationaal Indische Partij), also called Insulinde or Sarekat Hindia, along with Tjipro Mangoenkoesoemo and Soewardi Soerjaningrat. He also represented Nyonya Vogel as a leader of the NIP branch in Surakarta. Haji Misbach as a propagandist of NIP had a significant role in the emergence of peasant protests in Surakarta around May 1919. He organized peasants in Surakarta into the kring, under NIP, based on the villages where the peasants lived. Therefore Misbach's intention in organizing the peasants was to unify them, peasants, in order to struggle with the oppression from the capitalist and colonial government. He not only organized, but he also reminded it is readers about how essential unity was. Besides, through Islam Bergerak, toward the peasant's protest in Surakarta, it published a caricature that clearly illustrates the power relation between the capitalist to the oppressed peasants. When it came out, the accusation of Misbach was inevitable. Even though they did not directly give orders to the peasants to protest, the organization of the peasants and propaganda efforts toward the protest had considerable influence. So this article illustrates the relationship between the action and propaganda of Haji Misbach to the peasant protest in Surakarta.

Keywords : Haji Misbach, Islam Bergerak, *Nationaal Indische Partij* (NIP)

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang Peranan Haji Misbach serta kaitannya dengan aksi protes kaum tani Surakarta pada tahun 1919. Antara tahun 1918-1920 Haji Misbach merupakan anggota aktif NIP (Nationaal Indische Partij) alias Insulinde, alias Sarekat Hindia bersama-sama dengan Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Ia juga mewakili Nyonya Vogel selaku ketua cabang NIP di Surakarta. Haji Misbach sebagai propagandis NIP memiliki peran aktif tertentu dalam timbulnya aksi protes kaum tani Surakarta sekitar bulan Mei tahun 1919. Ia mengorganisir kaum tani Surakarta kedalam kring-kring milik NIP berdasarkan desa yang menjadi tempat tinggal petani tersebut. Adapun maksud Misbach mengorganisir kaum tani ialah karena Misbach menganggap bahwa persatuan aksi dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh kapitalisme dan pemerintah kolonial itu penting. Tidak hanya mengorganisir, ia juga aktif membuat tulisan propaganda menyerukan pentingnya nilai persatuan. Selain itu melalui Islam Bergerak, menjelang pecahnya aksi protes sempat diterbitkan karikatur yang secara gamblang menggambarkan relasi kuasa antara kaum kapitalis dengan petani yang tertindas. Ketika aksi protes meletus, tuduhan terhadap Misbach tidak terhindarkan. Meski Misbach tidak memerintahkan langsung kepada kaum tani yang sudah bergabung dalam NIP untuk melakukan aksi protes, pengorganisan dan upaya-upaya propaganda menjelang meletusnya aksi protes cukup berpengaruh.

Kata kunci : Haji Misbach, Islam Bergerak, *Nationaal Indische Partij* (NIP)

PENDAHULUAN

Haji Misbach dan kaum tani Surakarta merupakan dua subjek sejarah yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain pada tahun 1919. Eksistensi keduanya dihubungkan dalam sebuah wadah organisasi yang bernama NIP (*Nationaal Indische Partij*) alias *Insulinde*, alias Sarekat Hindia. Lebih spesifik lagi, keduanya saling identik ketika terjadi aksi protes para petani di Surakarta sekitar bulan Mei tahun 1919. Ketika aksi protes meletus, ramai-ramai surat kabar Belanda dan pemerintah kolonial menimbulkan prasangka bahwa Misbach adalah tokoh dibalik terjadinya aksi protes kaum tani. Adapun terbentuknya prasangka tersebut bukanlah tanpa sebab, karena Haji Misbach adalah tokoh sentral yang berperan mengorganisir kaum tani Surakarta ke dalam kring-kring milik Sarekat Hindia cabang Surakarta (Shiraishi, 1997).

Prasangka yang digunakan oleh pemerintah kolonial dan orang-orang Belanda juga bukan hanya karena posisi Haji Misbach dalam Sarekat Hindia, namun juga aktifitasnya di surat kabar *Islam Bergerak*. Antara tahun 1918 sampai dengan tahun 1919, *Islam Bergerak* sebagai surat kabar Islam mulai memperhatikan secara intensif masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum kromo. Kaum kromo dalam bahasa Jawa berarti kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat yang tidak memiliki pangkat atau jabatan apapun. Artinya anggota masyarakat dengan status biasa-biasa saja, bahkan rendahan.

Definisi kaum kromo pada masa pergerakan nasional meliputi kaum buruh dan kaum tani yang bekerja di pabrik pengolahan maupun perkebunan swasta. Islam Bergerak yang semula organ politik Islam Haji Misbach dalam dunia pers, lantas bertransformasi menjadi forum diskusi para aktivis pergerakan untuk menyampaikan opini dan mendiskusikan perihal masalah-masalah yang dihadapi kaum kromo. Kaum kromo selalu diposisikan sebagai korban penindasan dan penghisapan oleh kaum kapitalis dan pemerintah kolonial. Bahkan menjelang terjadinya aksi protes,

Islam Bergerak pernah menerbitkan sebuah karikatur propaganda yang mengilustrasikan nasib kaum tani, relasi kuasa antara kaum tani dengan pemodal, sekaligus hukum-hukum kolonial yang semakin membelenggu kemerdekaan mereka. Sehingga surat kabar Islam Bergerak bisa diposisikan sebagai surat kabar yang keras dalam mengkritik sekaligus menyerang praktik ekonomi kapitalisme di Jawa yang mengorbankan kesejahteraan hidup kaum tani.

Kaitan antara Haji Misbach dengan kaum tani Surakarta serta karakteristik surat kabar *Islam Bergerak* yang keras, pada akhirnya merujuk pada urgensi dan tujuan dilakukannya penulisan artikel ini. *Pertama*, artikel ini diposisikan untuk memperkuat tulisan Penulis sebelumnya dalam skripsi yang berjudul “Vorstenlanden Bergoentjang: Aksi dan Propaganda Haji Misbach dalam Gerakan Kaum Buruh dan Kaum Tani Surakarta Tahun 1916-1926”. *Kedua*, menyajikan upaya-upaya propaganda Haji Misbach di dalam surat kabar Islam Bergerak baik dalam bentuk tulisan maupun hasil penggunaan wewenangnya sebagai direktur. *Ketiga*, menyajikan kronologi aksi protes kaum tani Surakarta serta korelasinya dengan aksi dan propaganda Haji Misbach di surat kabar Islam Bergerak pada tahun 1919.

METODE

Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengkonstruksi peristiwa aksi protes kaum tani Surakarta tahun 1919 serta kaitannya dengan upaya-upaya propaganda Haji Misbach di surat kabar Islam Bergerak. Metode penelitian sejarah merupakan kerangka dan langkah kerja untuk mengkonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Adapun langkah metode penelitian sejarah meliputi: (1) pengumpulan sumber, (2) kritik sumber, dan (3) historiografi (Sjamsuddin, 2011). Pengumpulan sumber (heuristik) berarti mengumpulkan sumber-

sumber sejarah berupa surat-surat kabar yang bisa dijadikan sebagai bahan penyusunan fakta, informasi, sekaligus rujukan. Kemudian kritik sumber meliputi keritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal secara sederhana bisa didefinisikan sebagai upaya menguji orisinalitas dan otentisitas sumber, sedangkan kritik internal berarti menguji kredibilitas informasi yang diperoleh dari sumber sejarah. Terakhir, historiografi meliputi penafsiran fakta-fakta sejarah, kemudian disintesis menjadi susunan deskripsi yang utuh, dan akhirnya ditulis dan disajikan dalam bentuk historiografi.

PEMBAHASAN

Pra-Kondisi

Tahun 1919 merupakan tahun yang pelik bagi kaum tani surakarta. Mereka harus menghadapi kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang memposisikan mereka ke dalam status sosial yang rendah sekaligus kondisi hidup yang jauh dari kata layak. Akibat dari meluasnya praktik liberalisasi ekonomi alias politik pintu terbuka di Hindia Belanda, para petani hidup dalam kemiskinan. Kini, pemerintah tidak lagi mendominasi secara langsung usaha-usaha produksi komoditas ekspor Hindia Belanda, melainkan diserahkan kepada pihak-pihak swasta. Pemerintah hanya memposisikan diri sebagai pemberi produk hukum dan melindungi usaha-usaha swasta di Hindia Belanda agar berjalan sukses dan aman serta mendatangkan keuntungan kepada negeri induk Belanda di Eropa.

Peranan swasta dalam perekonomian Hindia Belanda melibatkan interaksi antara pemilik modal, atau sebut saja perusahaan perkebunan, dengan para petani yang memiliki hak garap atas tanah di desa tempat tinggal mereka. Perusahaan perkebunan memiliki posisi sebagai penyewa tanah, sedangkan para petani diposisikan sebagai pemberi sewa. Tanah petani disewakan kepada perusahaan perkebunan untuk dijadikan lahan perkebunan komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan

tembakau. Namun dalam kasus petani Surakarta, komoditas yang paling dominan ditanam oleh perusahaan perkebunan ialah tanaman tebu. Dalam laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh B. Ockers (1934) selaku asisten residen untuk urusan agraria di Surakarta, tercatat bahwa di Surakarta terdapat 85 perusahaan perkebunan meliputi perkebunan tebu, tembakau, teh, bahkan beras. Namun perkebunan tebu memiliki posisi yang paling dominan di antara komoditas-komoditas yang lain. Artinya dalam praktik ekonomi liberal di Hindia Belanda, jumlah usaha perkebunan komoditas ekspor dan praktik sewa-menyewa tanah semakin meningkat.

Namun, peningkatan sewa-menyewa tanah dalam ekonomi liberal di Hindia Belanda tidak sebanding dengan kompensasi yang diberikan kepada para petani yang disewa tanahnya. Biaya sewa yang diberikan perusahaan perkebunan kepada petani jumlahnya sedikit yaitu berada pada kisaran harga f 66 untuk setiap bulannya (Gie, 2016). Padahal, bila petani menanam tanaman padi keuntungannya bisa lebih dari itu, bahkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kaum tani bukannya enggan menolak mekanisme sewa tanah yang merugikan mereka, melainkan di dalamnya ada keterlibatan elit tradisional yang mempermudah proses penyewaan tanah untuk perusahaan perkebunan.

Pada tahun 1919, bagi kepala desa yang mampu membujuk petani untuk menyewakan tanahnya kepada perusahaan perkebunan, diberikan imbalan sebesar f 2,5 untuk setiap bau (1 bau = 7096,5 m²) tanahnya (Gie, 2016). Dengan begitu, penyewaan tanah petani yang semula digunakan untuk menanam padi yang dilakukan secara massif tidak bisa dihindarkan. Akibatnya lahan persawahan semakin berkurang karena tergantikan dengan kebun-kebun tanaman ekspor.

Khusus wilayah *vorstenlanden*, salah satunya Surakarta, pemerintah kolonial melakukan kebijakan reorganisasi administrasi, alias reformasi agraria. Kebijakan reorganisasi

dilakukan demi memudahkan pelaksanaan swastanisasi usaha perkebunan di wilayah Surakarta sekaligus membuka ruang bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi dan mengamankan langsung usaha-usaha perkebunan swasta.

Adapun ciri-ciri umum reorganisasi administrasi di wilayah *vorstenlanden* meliputi penghapusan tanah lungguh, pembentukan desa sebagai unit administrasi, dan pemberian hak yang jelas kepada para petani perihal penggunaan tanah (Larson, 1990; Shiraishi, 1997). Dalam tulisan ini, reorganisasi administrasi cukup difokuskan kepada penghapusan tanah lungguh karena dalam beberapa hal berpengaruh terhadap timbulnya aksi protes pada tahun 1919. Dampak dari reorganisasi administrasi dirasakan oleh para petani maupun elit tradisional (patuh) yang dihapus haknya atas tanah lungguh.

Para petani barangkali menganggap reorganisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada mereka, karena pada dasarnya hidup mereka tetap menderita akibat serba kekurangan. Namun, bagi elit tradisional, perubahan ini sangat berarti. Karena dengan penghapusan tanah lungguh, berarti kehilangan sarana kekuasaan tradisional mereka dihadapan para petani. Karena didalamnya elit tradisional berperan sebagai patron yang melindungi hak-hak para petani yang menjadi tanggung jawab mereka. Sedangkan para petani dikategorikan sebagai klien yang memberikan hasil bumi yang mereka panen kepada elit tradisional atas jasa patronase yang telah mereka dirikan.

Dampak yang paling nyata dari pergantian fungsi lahan dari sawah padi menjadi kebun komoditas ekspor ialah menurunnya produksi beras secara drastis. Semakin lama, produksi beras di Jawa tidak bisa memenuhi permintaan akan beras untuk dikonsumsi oleh rakyat Jawa kebanyakan. Dengan begitu, dampak yang tidak terhindarkan dari penurunan drastis produksi beras ialah timbulnya wabah kelaparan. Wabah ini menjalar di pulau Jawa salah satunya Surakarta yang banyak dilakukan alih fungsi

lahan menjadi perkebunan tebu. Tidak hanya itu, wabah kelaparan yang menjangkit para petani juga diperparah dengan timbulnya wabah pes.

Ketika kondisi-kondisi diatas timbul meliputi wabah kelaparan dan hilangnya kekuasaan tradisional bagi para bekas pemegang lungguh, muncul ketidakpuasan dan keresahan diantara kaum tani dan bekas pemegang tanah lungguh (patuh) dan bekel. Secara internal ketidakpuasan ini mendorong kaum tani melakukan aksi protes untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka, secara eksternal momentum ini dimanfaatkan oleh Haji Misbach untuk memperbesar jaringan massa organisasi NIP dan gerakan perlawanan kepada pemerintah kolonial dan perusahaan swasta terkait.

Haji Misbach Propagandis NIP

Haji Misbach antara tahun 1918 sampai dengan 1920 merupakan anggota NIP yang aktif. Misbach banyak terlibat dalam pertemuan-pertemuan NIP maupun pembentukan cabangnya di Surakarta. Ia dikenal sebagai propagandis NIP, maka propaganda-propaganda Misbach di surat kabar *Islam Bergerak* sedikit banyaknya menjadi bagian dari propaganda NIP alias Sarekat Hindia. Maka bisa dikatakan Islam Bergerak secara tidak langsung menjadi organ tidak resmi NIP, dilihat dari keaktifan Misbach di NIP dan peran dominannya di dalam Islam Bergerak.

Terlebih dahulu perlu dideskripsikan proses pembentukan maupun peran Misbach dalam memperluas jaringan anggota NIP di daerah Surakarta. Ketika itu, NIP cabang Surakarta diketuai oleh Nyonya Vogel, istri dari Tjipto Mangoenkoesoemo. Sedangkan Misbach memiliki posisi sebagai sekretaris cabang yang mewakili Nyonya Vogel sebagai ketua cabang. Hanya saja dalam praktiknya, ialah Haji Misbach yang menjadi ketua *de facto* NIP cabang Surakarta (McVey, 2017). Karena Haji Misbach yang mengembangkan jaringan anggota NIP di Surakarta menjadi organisasi

yang cukup diperhitungkan dari segi jumlah anggota.

NIP alias Sarekat Hindia merupakan organisasi pergerakan di bidang sosial politik yang secara komposisi keanggotaan didominasi oleh golongan Indo. NIP memiliki markas pusat di kota Semarang, satu kota dengan organisasi ISDV dan Sarekat Islam Semarang yang diketuai oleh Semaoen. Kemudian NIP di dalam kepengurusan pusat diketuai oleh Soewardi Soerjaningrat. Ketika Misbach bergabung dengan NIP pada tahun 1918, ia berhasil menjaring petani-petani di Surakarta menjadi anggota-anggota NIP. Kegiatan-kegiatan Misbach sebagai mubalig di desa-desa mampu menjangkau para petani yang tinggal di desa.

Sekitar 1500 petani Surakarta menjadi anggota NIP. Mereka dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang disebut kring-kring Sarekat Hindia berdasarkan desa tempat tinggal para petani yang bergabung. Tidak hanya para petani, elit tradisional yang semula memiliki kedudukan dalam sistem tanah lungguh seperti patuh, dan bekel juga ada yang bergabung dengan kring-kring Sarekat Hindia. Setelah penghapusan sistem tanah lungguh dan diganti dengan reorganisasi administrasi mereka kehilangan kedudukan tradisional mereka dan memilih bergabung dengan NIP antara tahun 1918 sampai dengan 1919. Sehingga organisasi NIP yang semula identik sebagai organisasi golongan Indo, mampu menjadi organisasi dengan basis massa yang banyak dan berkomposisi petani Jawa di Surakarta.

Haji Misbach dalam rangka menjadikan pergerakan kaum petani surakarta solid baik dari segi organisasi dan solidaritasnya, menganjurkan agar segenap golongan yang merasa tertindas untuk bersatu. Dalam surat kabar *Islam Bergerak* tanggal 10 Mei tahun 1919, M. Misbach (1919) menganjurkan ide tentang persatuan yang disebut dalam istilah "keroekoenan". Ia menyatakan:

Kita membilang jang diperbanjak terima kasih kepada leden kita redactie I. B. jang

mana ia telah berdebar-debar mengoeraikan boewah fikirannya di persimpangan dewan kita I. B. hingga mana tiada mengetoeng pajah tjapainja, sebab tak tahan mengampah perasaannya jang ia poenja bangsa dan agamanya (Islam) sekedjap hari bertambahlah poela tindesan dan desekan jang ada padanja sifat keadaan tanah Djawa semangkin lama prie kehidoepan rajat amatlah soekarnja, fikiran jang selalu berdjenis-djenis; merasakan roepa-roepa hal jang terderita sebage masoek di dalam alam SESAK, lantaran mana tentang kehidoepan dan kemerdekaannya atau agamanya sama sekali tida dapat perlindoengan jang tjoekoep, semata-mata jalah tindesan jang ada pada kita.

Dengan Ichtiar secara bagaimanakan agar kita kaoem boemipoetra akan melinjapkan hal-hal jang terseboet di atas itoe? Inilah masih terlampau amat petangnja orang berkata akan menjampekan maksoed kita itoe, misti kita berboeat actie dengan djalan keroekoenan kita, inilah soedah ternjata sekali, bila kita beloem bersatoe hati (roekoen) nistjaja barang apa jang kita kehendaki akan djatoeh sia-sia belaka. (hlm. 1)

Misbach di atas sudah menganjurkan agar segenap rakyat bumiputra termasuk para petani untuk bersatu. Tetapi ia belum menjelaskan urgensi dibalik persatuan rakyat. Lantas kemudian M. Misbach (1919) melanjutkan:

Roekoen itoe jang terlampau soesah didapatnja, karena sebelome kita kaoem boemipoetra berbangoen lantaran tertoe toep oleh orang jang mempermainkan kaoem kita, lebih dahoe loe benih persatoean dan benih bertjeraian soedah dimainkan oleh fihak jang sengadja memoeterkan anak Hindia agar soepaja anak Hindia tidak bisa roekoen agar selamanja biar berselisih sama dengan bangsa-bangsa jang tinggal ditoempah darah kita Hindia, teroetama poela pada kaoem kita boemipoetra sendiri. Politiek ini tampaklah pada kita jang seolah-olah agar tanah Hindia bisa

kekal selama-lamanja terenggam oleh pemerintah Belanda. Terboekti dari akal regeering jang katanja melindoengi pada rajatnja, tetapi nampaklah pada kita, bahwa perkataan ini hanjalah omong kosong belaka adanja masih banjak atoeran jang seolah-olah dengan memandang bangsa, lebih tegas perlindoengan pamarintah hanjalah pada kaoem kapitalisme, sedang rajatnja paman tani atau si kromos tinggal mendjadi koerbannja, boekti mana tidak oesah kita oeraikan disini, karena t. t. pematja soedah tentoe lebih makloem lah kiranja. (hlm. 1)

Di dalam tulisan di atas Haji Misbach menyebut tiga subjek dalam realitas yang berusaha ia jelaskan dalam tulisannya. Ia menyebut "regeerings" (pemerintah), "keom kapitalisme", dan "kaoem boemipoetra" atau "si kromos". Di antara ketiga subjek kelas sosial tersebut, terjadi interaksi sosial yang tidak seimbang, yaitu "kaeom boemipoetra" atau "si kromos" berada di titik subordinat oleh "regerings" dan "kaeom kapitalisme". Dengan nyata Misbach menyebutkan bahwa hubungan diantara ketiga subjek kelas sosial tersebut ialah antara di penindas dengan si tertindas, Maka akibatnya adalah kaum bumiputra hidup dalam keadaan "sesak".

Misbach juga menyesalkan bahwa pemerintah bukannya berpihak pada rakyatnya, melainkan berpihak pada kaum kapitalis yang menindas rakyat. Keadaan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kaum bumiputra dalam keadaan tersudutkan karena memiliki dua musuh besar yaitu kaum kapitalis yang menindas langsung dengan pemerintah sebagai pelindung kaum kapitalis tadi. Kalimat terakhir yang digunakan tergolong menarik untuk diperhatikan yaitu "boekti mana tidak oesah kita oeraikan disini, karena t. t. pematja soedah lah lebih makloem kiranja". Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa bagi Misbach tidak adilnya pemerintah dan keadaan sosial ekonomi yang menindas bagi rakyat tidak perlu dibuktikan langsung oleh Misbach. Karena kondisi tersebut merupakan

kondisi yang bisa di amati langsung dalam kehidupan sehari-hari pembaca Islam Bergerak. Penderitaan rakyat sudah menjadi pemandangan umum kehidupan di Jawa, salah satunya Surakarta. Sehingga Misbach sampai pada simpulan bahwa rakyat atau boleh sebut saja kaum tani harus melakukan aksi persatuan yang ia sebut dengan istilah "roekoen".

Sebagai pembanding, seorang bernama I. Boechari (1919) juga menulis tentang tidak adilnya pemerintah dalam berpihak. Ia mengatakan:

Maka dari sabab pamarintah kita kerandjangan boerdi kapitalisme, sehingga ia mendjadi serasa pikirannja dengan kaoem-kaoem oeang jang berboedi pemeras kepada kita rajat, dan pengisap darah djoega, sehingga kita rajat kehilangan sipat kemanoesiaannja, karena dianggapnja lemboe perasannja jang banjak memberi keoentoengan kepadanya.

Boedi kelaoean pemerintah seperti terseboet diatas itoe soedah barang tentoe menimboelkan hilang kasih sajangnja rajat kepadanya, bertoekar dengan kebentjian dan kepanasan hari ja betoel boeat masa sekarang kita rajat beloem berani melihatkan gginja dengan seterang-terangnja, maar pemerintah djangan kira bahwa kita rajat kasih sajang kepadanya, sebabnja kita rajat seperti takoet betoel kepadanya. O! Sekaliki tidak djika pemerintah beloem soeka memboeang adatnja jang tidak loeroes itoe. Tetapi kalau pemerintah soedah memboeang adatnja jang bengkok, diganti dengan boedi oendang-oendang, moedah-moedahan kita rajat toemboeh boedinja kasih sajang kepada pemerintah, jang dapat memakmoerkan tanah djadjahannja (hlm. 1).

Seperti yang sudah disebutkan oleh penulis sebelumnya, bahwa tidak adilnya sikap pemerintah dan penindasan terhadap rakyat sudah menjadi pemandangan umum di dalam realitas sosial masyarakat Jawa, salah satunya Surakarta. Kaum tani menjadi kelas sosial yang rendah dan menjadi objek dominasi sekaligus

penindasa oleh kaum kapitalis maupun pemerintah kolonial. Maka simpulan Misbach untuk “roekoen” pada zamannya digunakan sebagai salah satu cara untuk membentuk gerakan yang kuat dan solid untuk mengubah realitas sosial yang ada.

Keadaan semakin parah dan mengecewakan ketika mosi fraksi bumiputra di dalam volksraad perihal pengurangan penanaman tebu di tolak. Pada tahun 1919, melihat wabah kelaparan yang semakin meluas serta penyakit pes, fraksi bumiputra di dalam volksraad mengajukan kepada pemerintah kolonial untuk mengurangi lahan tebu sebanyak 25 persen. Namun mosi tersebut ditolak lantaran jumlah keanggotaan fraksi bumiputra di dalam volksraad tergolong sedikit bila dibandingkan anggota-anggota dari fraksi lain. Bahkan banyak di antara mereka yang bisa dianggap sebagai representasi kehadiran pengusaha perkebunan tebu dan gula. Maka dari itu Islam Bergerak menerbitkan sebuah tulisan “Pendahoeloewan” dan sebuah karikatur pada tanggal 20 April 1919. Berikut kutipan dari tulisan tersebut perihal kegagalan mosi fraksi bumiputra:

Kedjadiannja di dalam volksraad. Diwan Ra'jat tetapi wakil-wakilnja ra'jat tida tjoekoep hingga kalah dengan wakil-wakilnja goela. Dengan kepoatoesan ini maka volksraad tidak berhak lagi djadi raadnja volk, tetapi raadnja goela: suikeraad. Pemimpin-pemimpin kita insjaflah toean-toean bahwa disitoe boekan tempat toean. Insjaflah toean-toean bahwa tempat toean haroelsah ditengah-tengah ra'jat toean jang sengsara dan terisap serta tertindas oleh loba tama'nja “zonding kapitalisme”. Apakah toean memihak kepada kapital? Atau toean-toean ingin oepahnja bersidang? Adalah toean-toean berenang pergaoelannja toean-toean besar? Berdjoeta-djoeta orang bangsamoe terantjam bahaja maonet! Hai ini toean-toean lebih mengerti dan lebih mengetahoei daripada kita, terboekti perkataan-perkataan toean jang pedas dan kedjam dalam volks-(suiker)-raad minta kekoerangannja tanaman teboe. Tetap

diwanja volksraad membela kepada suiker industrie, jang telah toean-toean toedoeih mengisap peloeh dan menindas kaoem boeroeh, orang-orang ketjil (maaflah saudara Tjokro!), jalah woedjoednja rajat toean.

Uraian di atas menunjukkan *Islam Bergerak* mengkritik sekaligus menyerang dengan keras keadaan volksraad yang menolak mosi fraksi bumiputra untuk mengurangi penanaman tebu hingga 25 persen. Kejadian tersebut disambut dengan rasa kecewa karena keberpihakan pemerintah kolonial terhadap perusahaan tebu dan gula semakin jelas dan terbukti. Padahal keadaan sudah sangat genting mengingat wabah kelaparan menjadi masalah yang serius pada tahun 1919 akibat kurangnya produksi beras.

Redaktur *Islam Bergerak* memberi sindiran kepada volksraad sebagai “suiker raad” atau dewannya gula sebagai bentuk kekecewaan. Sindiran tersebut dibuat lantaran volksraad yang menggunakan kata “volks” yang artinya rakyat, justru lebih berpihak pada perusahaan gula. Redaktur *Islam Bergerak* juga melihat bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari volksraad bila untuk masalah sepeenting wabah kelaparan pun tidak diperdulikan oleh anggota dewannya. Maka mereka memberi peringatan kepada tokoh organisasi pergerakan



Gambar 1. Karikatur Propaganda pada Surat Kabar *Islam Bergerak* 20 April 1919

yang berada di dalam volksraad seperti Tjokroaminoto bahwa volksraad tidak bisa diharapkan lagi. Bahwa seharusnya posisinya berada di tengah-tengah rakyat, bukannya di dalam volksraad yang tidak ada gunanya bagi rakyat. Kemudian tulisan tersebut juga dibubuhi karikatur sebagai berikut:

Kondisi hidup para petani di desa sudah sangat memprihatinkan. Di dalam karikatur, petani digambarkan dengan kondisi fisik yang kurus hingga terlihat bentuk tulangnya, menjadi simbol dari tubuh yang kelaparan. Jelas-jelas dalam karikatur ini penyebab dari penderitaan petani adalah penghisapan kaum kapitalis. Ia dijadikan sebagai musuh yang paling nampak pada karikatur di atas karena memang adalah kaum kapitalis yang berhubungan langsung dengan petani dalam aktifitas produksi di kebun maupun pabrik, berupa penindasan. “Kamoe pegang jang kras!!! Bjar kami moedah mengisepnja” kata “si kapitalis” agar petani bekerja keras untuk memaksimalkan hasil produksi demi keuntungan kapitalis.

Gambar 1. memperlihatkan kepala petani digenggam oleh “yang hanya terlihat tangannya” bertuliskan Swb. Nomor 154 dan 156 yaitu peraturan yang membungkam para petani agar tidak menyuarakan penderitaannya. Penderitaan petani dibuat semakin berat akibat harus menanggung beban pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah. Di wilayah Kesunanan Surakarta, menyebut istilah “Pakoe” erat kaitannya dengan kosmologi budaya Jawa yang disematkan dalam gelar raja Jawa.

Setiap sunan Surakarta bergelar Pakubuwono yang artinya berarti “Paku-Bumi” yaitu tempat menancapnya atau patokan kehidupan di dunia. Akibatnya status sebagai seorang Sunan sangat di sakralkan. Namun zaman telah berubah, pemerintah di Kesunanan yang tidak berdaya menunjukkan bahwa Sunan bukan lagi “pakoekoe” tetapi sekarang “saoehkoe” yang kapan saja bisa di buang ke dasar lautan. Sehingga sekarang bukan lagi “toeankoe” tetapi “moesoehkoe”

karena tidak melaksanakan peran patronasenya sebagai pelindung rakyat korban kapitalisme.

Kaum Tani Bergerak: Aksi Protes Petani Surakarta Tahun 1919

Pengorganisasian para petani Surakarta kedalam kring-kring Sarekat Hindia dan penerbitan karikatur sekaligus tulisan propaganda pada 20 April 1919, berujung pada timbulnya aksi-aksi protes yang dilakukan oleh para petani. Sebelum aksi protes terjadi, tepatnya pada tanggal 3 Mei datang beberapa orang kuli dari desa Gawok dan Tegalgondo di stasiun Gawok mengatakan bahwa bila tuntutan mereka akan kenaikan upah dan harga sewa tanah tidak dipenuhi, akan dilakukan aksi mogok.

Lantas pada hari yang sama datang 9 orang opsir untuk menangkap kuli-kuli tersebut yang telah memberi ancaman pemogokan. Bukannya mencegah pemogokan, penangkapan kuli-kuli yang datang ke stasiun Gawok justru berlanjut menjadi aksi pemogokan yang lebih besar. Pemogokan kemungkinan terjadi pada awal Mei setelah pada tanggal 3 kuli-kuli tadi ditangkap oleh 9 opsir polisi yang menghampiri mereka. Karena pada tanggal 10 Mei, ketika awal mula pemogokan di desa Nglungge dimulai, belum ada tokoh Sarekat Hindia di tempat sebagai pemimpin pemogokan. Karena pemogokan ini memang bukan inisiasi pemimpin pusat Sarekat Hindia.

Siangnya, Misbach yang sedang dirumah didatangi oleh salah seorang perwakilan pemogok. Misbach diminta untuk datang dan diminta bantuannya terhadap aksi pemogokan. Jadi disini, Misbach justru baru datang ke tempat setelah pemogokan sudah terjadi. Sesampainya Misbach di tempat yang terjadi justru ramai-ramai orang minta bergabung dalam Sarekat Hindia. Sesudahnya yang terjadi justru pemogokan menyebar ke desa-desa lainnya yaitu Nglungge, Pudung, Dimoro, Kedung Duren, dan Gawok. Menurut Laporan Sinar Hindia pada tanggal 10 Mei, pemogokan di Solo diikuti oleh lebih dari 2000 petani dengan rincian 800 orang dari

Nglungge, 500 orang dari Pudung, 500 orang dari Dimoro, 300 orang dari Gawok, dan 200 orang dari Karang Duren. Melihat jumlahnya, rincian peserta mogok yang dikabarkan Islam Bergerak dan Sinar Hindia sulit dipercaya keakuratannya. Tetapi keduanya menunjukkan bahwa aksi protes petani ini melibatkan petani dalam jumlah yang cukup besar sehingga menimbulkan ketakutan pemerintah kolonial yang segera melakukan tindakan represi terhadap peserta aksi.

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa aksi protes kaum tani di Surakarta pada tahun 1919 bukanlah berdasarkan perintah atau instruksi resmi dari Sarekat Hindia, melainkan inisiasi pimpinan-pimpinan kring-kring Sarekat Hindia. Keterlibatan Misbach di dalamnya hanya sejauh pembentukan kring-kring Sarekat Hindia di Surakarta. Sekalipun ketika aksi protes sudah terjadi Misbach justru terus mendorong para petani agar tetap melakukan aksi protes. Pihak-pihak yang memimpin dan menginisiasi aksi protes justru pemimpin-pemimpin masing-masing kring-kring petani Sarekat Hindia yang berasal dari bekas pemegang tanah lungguh dan bekel (Shiraishi, 1997, hlm. 206).

Pasca dilakukannya reorganisasi administrasi di wilayah Surakarta, para bekas pemegang tanah lungguh dan bekel kehilangan sarana kekuasaan tradisional maupun sumber pendapatan mereka yang paling dominan. Ketika sistem tanah lungguh dihapuskan, para bekas pemegang tanah lungguh yang tinggal di bekas tanah lungguh mereka harus hidup hanya dari uang kompensasi dan gaji yang kecil saat terjadi inflasi harga kebutuhan pokok. Bahkan mereka juga kini hidup di bawah administrasi desa yang dipimpin oleh lurah bekas bekel mereka. Hal yang sama juga terjadi diantara kebanyakan bekas bekel, meski mereka diprioritaskan untuk dijadikan lurah atau kepala desa, pada kenyataannya hanya sepertiga yang terpilih sehingga sisanya juga kehilangan status mereka sebagai bekel. Sehingga baik bekas pemegang tanah lungguh maupun bekas bekel memilih untuk bergabung

dengan Sarekat Hindia ketika Misbach membuka jalan keanggotaan dan ruang aksi.

SIMPULAN

Aksi protes yang dilakukan oleh petani dari Nglungge, Pudung, Dimoro, dan Gawok berujung pada penangkapan Misbach. Penangkapan Misbach dilakukan pada tanggal 7 Mei 1919 setelah dipanggil oleh Asisten Residen ke rumahnya untuk diminta keterangan perihal aksi protes (Sastrosiswojo, 1919). Misbach ditangkap atas tuduhan penghasutan dengan berbicara "orang bekerdja haroes mengingati kekoetaan badan dan pikiran" di hadapan para petani ditambah seorang saksi yang bernama Haji Bakrie.

Ucapan Misbach oleh pemerintah diterjemahkan sebagai upaya penghasutan agar pemogokan menyebar ke daerah lainnya sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban. Dugaan ini diperbesar oleh kecurigaan opsir polisi terhadap pertemuan-pertemuan pembentukan kring Sarekat Hindia yang sudah dilakukan oleh Misbach sebelum pemogokan terjadi. Tetapi harus dicermati bahwa setiap pertemuan yang diselenggarakan pimpinan Sarekat Hindia selalu dihadiri oleh opsir polisi untuk mengawasi jalannya pertemuan. Pengawasan ini juga bentuk spionase terhadap berbagai aktifitas pergerakan untuk dilaporkan kepada pejabat lokal. Artinya pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pimpinan Sarekat Hindia termasuk Misbach adalah pertemuan yang legal. Bahkan, apabila Misbach betul-betul melakukan penghasutan dalam pertemuan polisi bisa langsung mengambil tindakan karena mereka hadir di tempat.

Akibatnya Misbach harus merasakan penahanan selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Penahanan Misbach bukanlah hasil vonis dalam pengadilan melainkan "preventief" yaitu masa penahanan sampai putusan persidangan dibuat apakah Misbach terbukti bersalah atau tidak. Lantas kawan-kawan Misbach baik di Sarekat Hindia dan Medan Moeslimin-Islam Bergerak tidak tinggal diam.

Penangkapan Misbach menjadi pembicaraan di berbagai surat kabar. Pada Surat kabar seperti *Islam Bergerak*, *Sinar Hindia*, dan *Persatoean Hindia* banyak mewartakan penangkapan Haji Misbach bahkan diantaranya memenuhi halaman muka. Pimpinan Sarekat Hindia seperti Sowardi Soerjaningrat, Ernest Douwes Dekker, dan Tjipto Magoenkoesoemo termasuk yang paling banyak berupaya untuk membebaskan Misbach dari tahanan. Mereka melakukan pertemuan dengan Asisten Residen untuk tidak melakukan tindakan represif termasuk pembebasan Misbach. Setelah enam proses pemeriksaan. Misbach akhirnya dibebaskan pada 22 Oktober 1919 dari preventief Klaten karena tidak terbukti bersalah.

REFERENSI

- Boechari, I. (1919, 10 April). "Boekti Keadilan Pamarintah akan Raijatnja". *Islam Bergerak*, hlm. 1.
- Gie, S. H. (2016). *Di bawah lentera merah: riwayat sarekat islam semarang (1917-1920)*. Mata Bangsa.
- "Keloear dari Tahanan" dalam *surat kabar Islam Bergerak*, hlm. 1. Surakarta: 1 November 1919.
- "Lagi K. M. Membrita Pemogok-Pemogok di Tegalgondo-Solo sebagai di Bawah Ini" dalam *surat kabar. Islam Bergerak*, hlm. 1. Surakarta: 20 Mei 1919.
- McVey, R. (2017). *Kemunculan komunisme indonesia*. Komunitas Bambu.
- Misbach, M. (1919, 10 Maret). "Orang bodo djoega machloek toehan, maka fikiran jang tinggi djoega bisa di dalam otaknja". *Islam Bergerak*, hlm.1.
- Larson, G. D. (1990). *Masa menjelang revolusi: keraton dan kehidupan politik di surakarta, 1912-1914*. Gadjah Mada University Press.
- Ockers, B. (1934). *Memorie van overgave assistant-resident t/b voor agrarische zaken te soerakarta*. Het Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel.
- "Pemogokan di Solo" dalam *surat kabar Sinar Hindia*, hlm. 2. Semarang: 10 Mei 1919.
- "Pendahoeloewan!!" dalam *surat kabar Islam Bergerak*, hlm. 1. Surakarta: 20 April 1919.
- Sastrosiswojo, S. (1919, 10 Mei). "Chabar Officiel". *Islam Bergerak*, hlm. 1.
- Shiraishi, T. (1997). *Zaman bergerak: radikalisme rakyat di jawa 1912-1926*. Grafiti.
- Sjamsuddin, H. (2011). *Metodologi sejarah*. Ombak.